

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SMK NEGERI 6 PADANG

Arlina

Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Padang
arlinefendi2@yahoo.co.id

ABSTRACT

Results of previous studies indicated that implementation of inclusive education program is not in accordance with the standards that have been formulated. This article was written to describe the implementation of the inclusive education program at SMK N 6 Padang which includes the aspects of input (antecedent), the aspects of the process (transaction) and the aspects of the results (output). This research is a program evaluation with the model the Stake's Countenance. The data in this study were obtained from the principal, teachers, and students inclusions. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and verification of data. The results of this study indicate that the aspect of the input is in compliance with the standard in terms of learners, but the aspects of curriculum, teaching, infrastructure, and funding have not met the standard. Besides, the aspect of the process, including planning and implementation, application of the principle of inclusive learning is still not optimal. In the aspect of output, the achievement of learning success is still lacking and the assessment of learning and the certificate is still equated with regular students.

Keywords: *Program Evaluation, Inclusive Education, input, process, output*

ABSTRAK

Hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa penerapan program pendidikan inklusi tidak sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMK N 6 Padang yang mencakup aspek input (*antecedent*), aspek proses (*transaction*) dan aspek hasil (*output*). Penelitian ini berjenis Evaluasi Program dengan model *Stake's Countenance*. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa inklusi. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input telah memenuhi standar dari segi peserta didik, namun aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan pendanaan belum memenuhi standar. Pada aspek proses yaitu perencanaan dan pelaksanaan, penerapan prinsip pembelajaran inklusi masih belum optimal. Pada aspek output, pencapaian keberhasilan pembelajaran masih kurang dan penilaian pembelajaran dan sertifikat disamakan dengan siswa reguler.

Kata Kunci: *Evaluasi program, Pendidikan Inklusi, input, proses, output*

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusi termasuk aktifitas baru di Indonesia, sehingga seringkali ditemukan permasalahan dan hambatan terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Permasalahan ini muncul karena melalui pendidikan inklusi pelayanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Konsep pendidikan kebutuhan khusus adalah bahwa semua anak termasuk ABK dipandang sebagai individu yang unik. Setiap individu memiliki perbedaan dalam perkembangan dan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda pula. ABK memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar akibat dari kecacatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, fokus utama dari pendidikan kebutuhan khusus adalah hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual¹.

Konsep pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*) melihat kebutuhan anak dari spektrum yang sangat luas, yaitu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang bersifat khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Akan tetapi ketidak-

sinkronan antara pihak sekolah sebagai pelaksana program dengan pemerintah sebagai pihak yang mencanangkan program menyebabkan munculnya permasalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan sekolah tidak dapat melaksanakan program inklusi yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik dan sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mewujudkan gagasan pendidikan.

ABK yang ada di SMK N 6 Padang terdiri dari anak tuna rungu, anak yang gangguan penglihatan, autisme, dan anak mengalami keterlambatan belajar yang datanya diperoleh dari tes IQ waktu penerimaan siswa baru. Layaknya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, sekolah harus menjalankan peraturan Menteri Pendidikan No 70 tahun 2009 yang tersusun pada pasal-pasal yang menjamin keterlaksanaan pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan ABK dengan memperhatikan hal-hal seperti sumber daya pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai kebutuhan, minat dan bakatnya, pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar ABK, menyediakan Guru Pembimbing khusus, menyesuaikan kurikulum dan aturan lainnya yang menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Kenyataan yang ada di lapangan, pada SMK Negeri 6 Padang penyelenggaraan pendidikan

¹ Miriam, DS. 2001. *Naskah Lokakarya Gabungan tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tingkat Nasional*. Lombok: Depdiknas.

inklusi terindikasi belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Terdapat permasalahan penerapan pola pendidikan yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasari terlaksananya pendidikan inklusi. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, serta kurikulum dan pembelajaran. Berdasarkan fenomena ini penulis tertarik dan telah melakukan suatu penelitian dengan tema Evaluasi Program Pendidikan Inklusi di SMKN 6 Padang.

B. Tinjauan Kepustakaan

Tyler² mengemukakan definisi mengenai evaluasi program, yaitu proses untuk mengetahui apakah tujuan dari suatu program telah dapat terealisasikan. Sedangkan Cronbach mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan³. Selanjutnya Evaluasi program menurut *Joint Commitee on Standards for Educational Evaluation*⁴ merupakan evaluasi yang menilai aktivitas di bidang pendidikan dengan menyediakan data yang berkelanjutan.

Model evaluasi dalam penelitian ini adalah model *Evaluasi Stake's*

Countenance yang digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi model ini berkeyakinan bahwa suatu evaluasi haruslah memberikan deskripsi dan pertimbangan sepenuhnya bagi evaluator. *Model Stake Countenance* menekankan pada peran evaluator dalam pengembangan dari tujuan program. Model evaluasi Stake terdiri dari dua matriks. Matriks pertama dinamakan matriks *Description* dan yang kedua dinamakan matriks *Judgment*. Matriks *Judgment* baru dapat dikerjakan oleh evaluator setelah matriks *Description* diselesaikan.

Matriks *Description* terdiri dari atas kategori *Intens* (Tujuan) dan *Observation* (akibat). Sedangkan matriks *Judgment* terdiri atas kategori *standard* (tolak ukur/kriteria) dan *Judgment* (pertimbangan). Pada setiap kategori terdiri dari tiga fokus yaitu: *Antecedent* (Masukan) yaitu suatu kondisi yang ada sebelum mengikuti program, *Transaction* (Proses) yaitu kegiatan ketika program sedang yang berjalan, dan *Outcomes* (Hasil) yaitu hasil yang diperoleh akibat program.

Sesuai dengan model evaluasi program *Stake Countenance Model* yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat dirancang tahapan penilaian dalam evaluasi yang mengacu pada standar penyelenggaraan pendidikan Inklusi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia dalam Permen-diknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau

² Dalam Wirawan. 2011. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks*. Jakarta: Rajawali Pers.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Bakat Istimewa⁵. Berikut acuan standar yang digunakan dalam evaluasi program Pendidikan Sekolah Inklusi di SMK Negeri 6 Padang dengan tahapan Input (*Antecedent*), tahapan Proses (*Transaction*) dan tahapan Hasil (*Output*).

Tahap Input (*Antecedent*)

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar⁶ menyatakan bahwa Evaluasi Input (*antecedent*) atau masukan mempertimbangkan kondisi awal yang dimiliki oleh suatu institusi untuk melaksanakan sebuah program. Menurut Wirawan⁷ evaluasi masukan mengidentifikasi tujuan, prioritas-prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, aset, peluang, rencana tindakan, rencana anggaran, potensi *cost effectiveness* untuk memenuhi kebutuhan, dan tujuan yang ditargetkan. Evaluasi masukan (*Input*) dilakukan oleh evaluator untuk menentukan dan memilih di antara rencana-rencana yang ada terkait dengan pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menskedul pekerjaan, menilai rencana-rencana aktifitas dan penganggaran. Tujuan dari evaluasi masukan adalah untuk menjangkau, menganalisis, dan menilai kecukupan kuantitas dan kualitas masukan yang

diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan program yang terkait dengan perencanaan program, penerima layanan program, pimpinan dan staf, alat dan bahan, fasilitas, anggaran.

Tahap Proses (*Transaction*)

Evaluasi proses memfokuskan kepada pelaksanaan program dan sering menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar⁸ evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana program dilakukan dan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Menurut Wirawan⁹ menyatakan bahwa evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan “Apakah program sudah dilaksanakan?” Evaluasi ini bertujuan untuk mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas program.

Tahapan Hasil (*Output*)

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar¹⁰ menyatakan bahwa evaluasi hasil merupakan tahap akhir evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan dan kecepatan tindakan yang diberikan dan dampak dari program yang dilakukan. Evaluasi hasil

⁵ Depdiknas. 2009. Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta : Depdiknas.

⁶ Arikunto, Suharsimi, & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁷ Wirawan. 2011. *Op cit*.

⁸ Arikunto, Suharsimi, & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. *Op cit*.

⁹ Wirawan. 2011. *Op cit*.

¹⁰ Arikunto, Suharsimi, & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. *Op cit*.

mengukur dan menilai keluaran dari program yaitu produk yang dihasilkan program. Berapa banyak dan seberapa baik produk yang dihasilkan oleh program yang telah dilakukan. Evaluasi hasil pelaksanaan program mengacu kepada pencapaian dari tujuan program yang telah dicanangkan. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus telah diutarakan dalam kajian sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi Hasil (Output) dapat dinilai dengan menggunakan indikator yang merupakan ketercapaian dari penyelenggaraan pendidikan inklusi yang secara umumnya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Padang yang beralamat di Jalan Suliki No. 1 Padang. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kepala tata usaha, guru dan anak berkebutuhan khusus yang ada di SMK Negeri 6 Padang.

Peneliti ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan pasif. Data yang terkumpul dengan berbagai teknik di atas selanjutnya dianalisis dengan teknik

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara terus menerus terhadap objek penelitian serta berupaya untuk tidak mempengaruhi data di lapangan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada SMK N 6 Padang dipaparkan berdasarkan masing-masing tahapan sebagai berikut.

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SMK Negeri 6 Padang pada Tahap Input (*Antecedent*)

1. Peserta Didik

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penerimaan siswa ABK pada SMK N 6 Padang dilakukan melalui pendaftaran *On Line* bersamaan dengan saat penerimaan siswa baru (PSB). Saat pendaftaran dilakukan tidak terdapat perbedaan syarat pendaftaran antar siswa ABK dengan siswa non ABK, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat diskriminasi dalam penerimaan siswa ABK di sekolah ini. Semua siswa yang memenuhi syarat pendaftaran dapat diterima.

Pembatasan yang dilakukan sekolah hanyalah pada saat melaksanakan tes IQ, siswa yang memiliki batas kemampuan akademik yang tidak bisa disetarakan dengan standar siswa yang layak bersekolah setingkat SMA dan SMK tidak dapat diterima untuk bergabung. Hal ini bertujuan agar calon siswa tidak terhambat dalam melaksanakan proses pem-

belajaran nantinya. Sedangkan keterbatasan fisik dan non fisik tidak menjadi hambatan dalam mendapatkan kesempatan belajar di SMK Negeri 6 Padang.

2. *Kurikulum*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah melalui koordinasi kepala sekolah telah melaksanakan upaya pengembangan kurikulum dengan melibatkan pihak-pihak sekolah saja. Namun hal ini berjalan lambat dan tidak ada kemajuan, karena tidak adanya koordinasi dari dinas pendidikan untuk mengakomodir jalannya pengembangan kurikulum seperti membentuk tim khusus yang datang dari pihak-pihak ahli di lapangan yang memahami dan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pendidikan luar biasa.

Menurut Hargio Santoso¹¹ modifikasi/ pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus (guru Pendidikan Luar Biasa) yang sudah berpengalaman mengajar di Sekolah Luar Biasa, dan ahli Pendidikan Luar Biasa (*Orthopaedagog*), yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi (Kepala SD Inklusi) dan sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa upaya pengembangan kurikulum yang dilakukan

SMK N 6 Padang masih belum efektif dan berhasil dikarenakan belum adanya tim khusus dan ahli yang dapat benar-benar membantu pengembangan kurikulum bagi sekolah inklusi.

3. *Tenaga Pendidik*

Hasil penelitian mengenai tenaga pendidik yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi menunjukkan bahwa sekolah sudah memiliki guru dengan jumlah yang memenuhi syarat dan mencukupi untuk pendidikan sekolah non inklusi. Namun untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, sekolah masih membutuhkan Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang memenuhi syarat. GPK yang dapat membantu sekolah inklusi dalam menangani pendidikan ABK dengan jumlah minimal satu orang untuk setiap sekolah. Hal ini menyulitkan bagi guru yang merasa tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi ABK. Sedangkan keberadaan guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menggantikan tugas GPK tidak seefektif keberadaan GPK. Guru mengharapkan adanya GPK dan adanya pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan kefahaman guru dalam menghadapi ABK di masa yang akan datang, tidak hanya sekedar sosialisasi.

4. *Pendanaan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah telah tersalurkan, dengan kegiatan sosialisasi selama dua hari, kemudian dana juga diberikan untuk

¹¹Santoso, Hargio. 2012. *Cara Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gusyen Publishing.

bantuan belajar bagi siswa inklusi. Dana yang diberikan pemerintah berjumlah Rp. 50.000.000,- sebagai tahap awal bantuan operasional pendidikan inklusi untuk SMK N 6 Padang. Dana telah diberikan pada tahun 2013, kemudian dana yang diberikan telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan untuk bantuan pendidikan bagi siswa inklusi. Dana yang diberikan telah habis dan tidak dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengembangan kurikulum ataupun penyediaan sarana dan prasarana ajar bagi siswa inklusi, mengingat jumlah dana yang disediakan sangat terbatas. Keterbatasan dana ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak dapat dilaksanakan untuk menyediakan dana dalam pengembangan kurikulum dan penyediaan sarana dan prasarana serta media ajar bagi siswa inklusi. Padahal media juga sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Menurut Slameto¹² media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi secara efektif dan efisien. Media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai dengan sempurna. Media pendidikan juga berperan sebagai perangsang

belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar.

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SMK Negeri 6 Padang pada Tahap Proses (*Transaction*)

Hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di SMK N 6 Padang pada tahap proses (*transaction*) ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan kepada siswa melalui pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pada bagian perencanaan pembelajaran diperoleh hasil penelitian bahwa sebagian besar guru belum memiliki perencanaan pembelajaran yang dirancang dengan memodifikasi pembelajaran dengan *setting* kelas inklusif, untuk menyesuaikan kebutuhan ABK pada pendidikan inklusif. Hal ini disebabkan guru memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga merasa kesulitan jika harus ditambah dengan tugas harus menyediakan perencanaan ajar bagi kelas inklusi.

Pelaksanaan dari perencanaan yang dibuat membutuhkan sarana dan prasarana khusus inklusi; sedangkan sekolah belum memilikinya. Hal ini dipandang akan sia-sia perencanaan yang dikembangkan karena keterbatasan media ajar yang dimiliki sekolah. Keterbatasan pengetahuan guru tentang cara merancang pembelajaran untuk kelas inklusi juga menyebabkan perencanaan pembelajaran tidak dapat disediakan sepenuhnya. Seharusnya ada pelatihan khusus untuk memberikan pengetahuan mengenai pembelajaran pada kelas inklusi agar dimasa yang akan datang dapat dilakukan pembelajaran

¹²Slameto. 2011. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta

berdasarkan perencanaan untuk kelas inklusi.

Dalam evaluasi untuk pelaksanaan pembelajaran ditemui kenyataan bahwa saat guru menyampaikan materi, siswa ABK sering menghadapi kesulitan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimilikinya. Kesulitan di lapangan yang terlihat antara lain seperti pada siswa yang mengalami keterbatasan gangguan pendengaran, daya tangkap, konsentrasi dan sebagainya dalam pembelajaran lebih sering meminta guru atau teman untuk mengulang kembali pembelajarannya jika hal yang disampaikan tidak tertulis dengan jelas melalui *in focus*, papan tulis, dan *job sheet* saat praktek. Hal ini mengakibatkan keefektifan guru dalam memberikan materi sering terhambat karena ABK banyak bertanya atau melakukan hal-hal yang membuat gaduh situasi di dalam kelas.

Pelaksanaan pendidikan inklusi bagi ABK masih belum berjalan sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Dalam pedoman implementasi pendidikan inklusi dinyatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran sekolah inklusi adalah: 1) perencanaan pengelolaan kelas, 2) perencanaan pengorganisasian bahan, 3) perencanaan strategi penerapan belajar, 4) perencanaan pemanfaatan sumber atau media ajar, dan 5) perencanaan penilaian. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan apersepsi, penyajian materi, implementasi metode, sumber media belajar, dan membina hubungan sosial antar

pribadi. Prinsip-prinsip pembelajaran pada sekolah inklusi terkait dengan prinsip motivasi, prinsip latar atau konteks, prinsip individualisasi, dan prinsip pemecahan masalah.

Berdasarkan teori di atas maka tertera jelas bahwa dalam pendidikan anak inklusi harus memperhatikan perencanaan, proses pelaksanaan dan prinsip-prinsip yang dapat menjamin pelaksanaan pendidikan inklusi berjalan baik. Namun karena pelaksanaan di lapangan tidak dapat menerapkan unsur-unsur dan aturan ini maka permasalahan pendidikan inklusi sering terjadi dan membuat tujuan pendidikan tidak tercapai.

Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SMK Negeri 6 Padang pada Tahap Hasil (*Output*)

Hasil penelitian pada tahap hasil atau output yang dinilai melalui penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa pada umumnya ABK merasa senang dapat bersekolah di sekolah umum sehingga menimbulkan motivasi peningkatan motivasi belajar ABK. Namun yang terjadi adalah banyak ABK yang tidak mendapatkan perhatian dalam belajar di kelas dan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan guru. Agar ABK mendapatkan perhatian maka keberadaan GPK dibutuhkan oleh sekolah.

Ketercapaian pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminasi pada ABK masih belum sebaik yang diharapkan. Seringkali diperhatikan di lapangan bahwa siswa ABK masih termarginalkan dan belum dapat dididik dengan baik oleh guru. Banyak guru yang membiarkan ABK

yang tidak dapat melaksanakan tugas dan latihan saat praktek. Guru merasa bingung bagaimana memberikan pemahaman materi yang disampaikan kepada anak terutama ABK yang memiliki kebutuhan khusus lamban belajar. Guru seringkali hanya membiarkan dan kemudian meminta siswa lainnya membantu penyelesaian tugas ABK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABK masih menghadapi kesulitan dalam belajar. Guru kurang memahami kebutuhan ABK dan merasa kesulitan dalam menghadapi ABK; sedangkan ABK merasa kesulitan pula menerima apa yang disampaikan guru. Akhirnya tujuan melaksanakan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi kepada siswa dirasa belum tercapai. Pendidik kadangkala tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi ABK dan dirasa bahwa sekolah belum mampu sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki ABK.

Dalam hal penilaian hasil belajar dan sertifikasi hasil belajar, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam pembelajaran guru hampir tidak pernah melaksanakan remedial untuk siswa ABK. Semua siswa ABK diluluskan dan diberi nilai di atas batas KKM, agar siswa tidak mengulang atau melakukan remedial. Hal ini dipandang guru sebagai upaya untuk membantu siswa ABK, akibat dari tidak adanya standar baku dalam menilai kemampuan ABK. Kurikulum yang ada belum dimodifikasi untuk ABK sehingga guru seringkali tidak memiliki patokan atau standar penilaian dalam mengevaluasi hasil

belajar ABK. Namun untuk siswa ABK yang telah menamatkan pendidikan dan mengikuti ujian nasional berhak mendapatkan Ijazah dan STTB yang dikeluarkan pemerintah setara dengan anak reguler lainnya.

E. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pada tahap Input (*Antecedent*) dapat disimpulkan bahwa: (a) Dalam aspek Peserta Didik, sekolah telah menyediakan kesempatan bagi ABK mendapatkan kesempatan belajar tanpa diskriminasi; (b) Dalam aspek Kurikulum, upaya pengembangan kurikulum yang dilakukan sekolah belum efektif dan berhasil; (c) Dalam aspek Tenaga Pendidik, sekolah belum memenuhi kriteria karena tidak memiliki GPK; (d) dalam aspek Sarana dan Prasarana, aspek ini belum layak disesuaikan dengan kekhususan ABK, (e) Dalam aspek Pendaan, pencairan dana awal telah habis dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan dana belajar pada siswa inklusi.
2. Pada tahap Proses (*Transaction*) dapat pula simpulkan bahwa: (a) Sebagian besar guru belum memiliki perencanaan pembelajaran yang dirancang dengan memodifikasi pembelajaran dengan *setting* kelas inklusif; (b) Pelaksanaan pembelajaran, masih terdapat ketimpangan-ketim-

- pangan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan yang menyebabkan tujuan pendidikan inklusi belum dapat tercapai dengan sepenuhnya; (c) Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran inklusi telah diupayakan dilakukan namun masih belum maksimal.
3. Selanjutnya pada tahap Hasil (*Output*) dapat pula disimpulkan bahwa: (a) Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan inklusi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi kepada siswa belum tercapai disebabkan pendidik tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi ABK; dan (b) Dalam penilaian hasil belajar dan sertifikasi hasil belajar, guru hampir tidak pernah melaksanakan remedial untuk siswa ABK. Meskipun demikian, siswa ABK yang telah menamatkan pendidikan dan mengikuti ujian nasional berhak mendapatkan Ijazah dan STTB yang dikeluarkan pemerintah setara dengan anak reguler lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi penelitian ini maka dapat diberikan rekomendasi dan saran penelitian kepada pihak-pihak berikut sebagai upaya dalam perbaikan program pendidikan inklusi di SMK N 6 Padang ke arah yang lebih baik, antara lain:

1. Pemerintah Kota Padang, terutama Dinas Pendidikan, agar

memberikan dukungan dana dan pengetahuan melalui pelatihan kepada pihak-pihak pelaksana Pendidikan Inklusi agar pendidikan inklusi ini dapat terlaksana dengan baik;

2. Kepala sekolah disarankan agar melaksanakan koordinasi dengan dinas Pendidikan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program dan meminta kebijakan dinas pendidikan mencarikan jalan keluar;
3. Guru perlu mengetahui bagaimana cara mengajar pada kelas *bersetting* Inklusi. Peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: pelatihan, tukar pengalaman, lokakarya, membaca buku, dan mengeksplorasi sumber lain, kemudian mempraktekkannya di dalam kelas maupun dengan pelaksanaan Program Pelatihan Individual (PPI);
4. Orangtua disarankan untuk melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, melakukan pengawasan dan pembinaan anak di rumah sebagai upaya dalam mendukung sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi; dan
5. Masyarakat hendaknya dapat menyatukan pemahaman tentang keberadaan sekolah inklusi, turut menghargai dan memahami keterbatasan ABK, dan menghargai kekhususan yang ada pada ABK untuk bersama-sama menjadi masyarakat yang ramah terhadap anak penyandang *difable*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi, & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. *Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa*. Jakarta. Depdiknas.
- Miriam, DS. 2001. *Naskah Lokakarya Gabungan tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tingkat Nasional*. Lombok: Depdiknas.
- Santoso, Hargio. 2012. *Cara Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gusyen Publishing.
- Slameto. 2011. *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wirawan. 2011. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks*. Jakarta: Rajawali Pers.